

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai dengan indikator indikator yang ada dapat disimpulkan bahwa

A. Partai Politik

Partai politik memiliki peran dan fungsi penting dalam system politik negara. Berikut adalah beberapa fungsi partai politik terhadap negara:

1. Pemilihan dan dampak politik :partai politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses politik dan kebijakan public melalui kampanye politik dan berbagai kegiatan lainnya. Dan Partai politik merupakan alat utama bagi warga Negara untuk terlibat dalam pemilihan umum dan memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan.
2. Representasi rakyat: Partai politik bertindak sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif dan pemerintahan. Mereka membawa suara dan aspirasi masyarakat ke dalam proses pembuatan keputusan politik dan berjuang untuk kepentingan rakyat yang mereka wakili.
3. Membentuk pemerintahan :Partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan pemerintahan. Ketika pemilihan umum

diadakan, partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak memiliki kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menjadi pemimpin negara. Ini berarti partai politik yang mendapatkan dukungan terbesar dari warga Negara memiliki kepercayaan untuk mengelola pemerintahan dan mengambil keputusan yang mempengaruhi arah dan kebijakan negara. Dalam demokrasi, pemilihan umum dan peran partai politik dalam membentuk pemerintahan adalah salah satu fondasi penting dalam menentukan arah Negara dan menghormati kehendak mayoritas rakyat.

4. Kontrol dan pengawasan: Partai politik berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Partai politik yang berada di oposisi dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat.
5. Sosialisasi politik: Partai politik berperan dalam mendidik dan mengajarkan masyarakat tentang politik, demokrasi, dan hak-hak politik mereka. Partai politik menjadi tempat di mana warga negara dapat mempelajari dan berpartisipasi dalam proses politik serta menyampaikan aspirasi mereka.
6. Pembentukan opini publik: Partai politik memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui kampanye politik, media, dan komunikasi politik. Mereka memperjuangkan gagasan dan

program politik mereka kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan pemilih.

Penting untuk dicatat bahwa fungsi partai politik dapat berbeda-beda dalam setiap negara dan tergantung pada sistem politik yang berlaku.

Partai politik PKB pada dasarnya juga merupakan partai yang menyalurkan aspirasi masyarakat kota Probolinggo, dilihat dari kinerja kader partai PKB yang menjabat sebagai dewan legislative, meskipun di dalamnya belum terdapat kader perempuan yang mewakili, hal ini setelah peneliti teliti dan melakukan survey tambahan pada masyarakat, hal ini terjadi karena individual kader perempuan yang memang dirasa kurang memenuhi standard masyarakat.

Pada partai politik PDI-P sama halnya dengan partai lain, PDI-P pun menampung segala bentuk aspirasi masyarakat setiap kalangan sesuai dengan jargon yang sering di gaungkan oleh partai ini yaitu kebersamaan wong cilik, PDI-P berkembang dengan keikutsertaan wong cilik sebagai simbol kepedulian mereka terhadap masyarakat, sesuai dengan yang disampaikan narasumber dari partai ini saat di wawancarai.

Kemudian pada partai Golkar pun sama dengan kedua partai sebelumnya, bahwa terciptanya partai ini tidak lain merupakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya.

B. Kesetaraan Gender

kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi gender masih terjadi di seluruh dunia, termasuk dalam politik, di mana kesetaraan gender dapat dicapai dengan mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak politik dan partisipasi politik perempuan.

Kesetaraan gender memiliki pengaruh yang sangat penting dalam memajukan suatu negara. Dalam konteks ini, kesetaraan gender dapat meningkatkan kapasitas Negara untuk mencapai kemajuan, mengatasi masalah kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan dengan efisiensi. Upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender juga menjadi strategi krusial dalam memberdayakan seluruh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender berdampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan bahagia. Negara-negara yang berhasil mencapai tingkat kesetaraan gender yang tinggi cenderung lebih terkoneksi dan mendapatkan manfaat yang lebih besar secara keseluruhan.

Dalam menghadapi isu kesetaraan gender, sangat penting untuk memperjuangkan keseimbangan gender, menghilangkan ketimpangan gender, memberikan kesempatan yang sama bagi kedua gender, serta mendorong keadilan tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, data dari Gender Development Index (GDI) menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum tercapai dengan baik. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi di ASEAN. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia dan mengatasi tantangan dan diskriminasi yang masih ada.

Menurut data United Nations Development Programme (UNDP) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index/GII*) Singapura terendah di ASEAN, sementara Indonesia meraih skor tertinggi. di negara-negara ASEAN, dengan Singapura memiliki pencapaian yang paling baik dan Indonesia memiliki GII tertinggi di antara negara-negara tersebut.

Pencapaian GII yang baik di Singapura mencakup aspek kesehatan reproduksi, fertilitas remaja, kesetaraan pendidikan, kesempatan kerja, dan keterlibatan perempuan di parlemen. Di Malaysia dan Brunei Darussalam, GII juga relatif rendah dengan dukungan dari indikator kesehatan reproduksi yang baik dan kesenjangan pendidikan yang rendah antara laki-laki dan perempuan.

Namun, Indonesia memiliki GII yang tertinggi di ASEAN, menunjukkan pencapaian pembangunan gender yang belum optimal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan, Indonesia juga berada di bawah rata-rata dunia dalam hal ketimpangan gender.

dalam realitasnya masih terdapat kesenjangan antara peran yang dilakukan oleh pria dan perempuan, terutama dalam peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, dengan tujuan mewujudkan kesejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan serta mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang politik.

Berikut adalah beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan gender:

1. Mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di masyarakat: Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti mengadakan kampanye pendidikan dan kesadaran public mengenai pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, juga perlu mempromosikan penghapusan stereotip gender dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan: Penting untuk memperkuat hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Dibutuhkan pula akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pelatihan yang mendukung kesejahteraan perempuan.

3. Memberikan kesempatan kepada perempuan: Diperlukan tindakan konkret untuk meningkatkan kesempatan perempuan dalam hal pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang setara. Langkah-langkah ini meliputi implementasi program pengembangan keterampilan dan pelatihan, memberikan akses yang adil terhadap modal usaha, dan mendukung kebijakan yang mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, tidak boleh diabaikan pentingnya mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan, termasuk keterlibatan mereka di lembaga legislative dan pemerintahan. Dengan caraini, diharapkan kesetaraan gender akan diperkuat, dan potensi perempuan dalam berbagai bidang akan lebih diakui dan dihargai.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta perubahan positif dalam mencapai kesetaraan gender, mengatasi diskriminasi, dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan secara menyeluruh.

ketidaksetaraan gender di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor konstruksi biologis, konstruksi budaya, dan konstruksi agama. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender:

1. Faktor konstruksi biologis: Terdapat persepsi bahwa perbedaan biologis antara pria dan perempuan menghasilkan peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam masyarakat. Misalnya, stereotip bahwa pria lebih kuat

secara fisik dan cocok untuk pekerjaan yang berat, sementara perempuan dianggap lebih lemah dan lebih cocok untuk peran domestik. Pandangan seperti ini dapat membatasi pilihan dan kesempatan bagi individu berdasarkan jenis kelamin.

2. Faktor konstruksi budaya: Budaya dan norma-norma social dalam masyarakat memiliki pengaruh terhadap pembagian peran gender dan cenderung memberikan preferensi atau keuntungan tertentu kepada satu jenis kelamin. Sebagai contoh, ada harapan bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, sementara pria diharapkan mencari nafkah di luar rumah. Norma-norma ini dapat membatasi akses perempuan ke pendidikan, karier, dan partisipasi politik.
3. Faktor konstruksi agama: Interpretasi agama tertentu dan norma-norma agama juga dapat memainkan peran dalam memperkuat ketidaksetaraan gender. Beberapa interpretasi agama mungkin mengajarkan tentang peran yang berbeda antara pria dan perempuan, dan mengatur hubungan dan kewajiban antara keduanya. Namun, penting untuk diingat bahwa agama juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk perubahan positif dan pemberdayaan perempuan, tergantung pada interpretasi dan pemahaman yang diterapkan.

Hasilnya, ketidaksetaraan gender dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan

beban ganda. Ketidaksetaraan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik, kesehatan reproduksi, serta kebebasan dan hak asasi perempuan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan. Ini meliputi edukasi dan kesadaran untuk mengubah norma-norma yang membatasi kesetaraan gender, pengesahan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan hukum dan penegakan hukum terhadap kekerasan gender, serta pembentukan budaya inklusif yang menghargai keberagaman dan kesetaraan antara pria dan perempuan.

Pada partai politik kesetaraan gender merupakan hal wajib yang harus diterapkan, hal ini telah diatur dalam regulasi yang mengatur terkait hak politik setiap warga negara termasuk perempuan.

Partai PKB, PDI-P dan GOLKAR Kota Probolinggo membuktikan pengimplementasian kesetaraan gender pada tubuh partai mereka dengan keikutsertaan kader perempuan di struktural kepengurusan pada tubuh partai.

C. PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

partisipasi politik perempuan dapat terjadi dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional. Partisipasi politik nonkonvensional melibatkan tindakan

protes atau aksi langsung yang dilakukan oleh kelompok penekan untuk memperjuangkan tujuan politik mereka. Ini bisa termasuk demonstrasi, mogok, kekerasan politik terhadap harta benda atau manusia, perang gerilya, kudeta, revolusi, dan sebagainya.

Sementara itu, Partisipasi politik konvensional melibatkan berbagai kegiatan, termasuk memberikan suara dalam pemilihan, terlibat dalam diskusi politik, ikut serta dalam kampanye politik, mendirikan partai politik atau kelompok kepentingan, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, serta berkomunikasi dengan pejabat politik atau birokrasi. Biasanya, partisipasi politik konvensional ini dilakukan oleh kelompok kepentingan, partai politik, lembaga masyarakat, dan entitas sejenisnya. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang memungkinkan warganegara untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan politik dan pengelolaan pemerintahan.

Partisipasi politik perempuan memiliki pentingnya sendiri dalam konteks demokrasi. Tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam masyarakat dapat mencerminkan tingkat demokrasi yang berkualitas. Namun, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih relatif rendah. Misalnya, berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya sebesar 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari total 575 anggota DPR RI.

Rendahnya partisipasi politik perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala budaya, struktural, dan bias gender. Kendala budaya mencakup norma dan ekspektasi yang membatasi peran dan keterlibatan perempuan dalam politik. Kendala struktural melibatkan hambatan akses terhadap sumber daya politik, termasuk pendidikan, dana kampanye, dan jaringan politik. Sedangkan bias gender mencakup persepsi stereotip dan diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik.

Budaya Masyarakat menjadi salah satu komponen penting penentu partisipasi politik perempuan, masyarakat yang masih menganut konsep patriarki sering kali memberikan batu sandungan kepada para perempuan ada banyak bentuk patriarki di lingkungan politik diantaranya :

1. Representasi yang Tidak Proporsional: Salah satu contoh nyata dari implementasi patriarki dalam politik adalah rendahnya representasi perempuan di posisi kekuasaan politik. Meskipun perempuan membentuk sekitar setengah dari populasi, mereka sering kali kurang diwakili dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan parlemen.

Contoh: Banyak negara di mana hanya sebagian kecil perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen atau menduduki jabatan politik tinggi. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri atau mengambil bagian dalam proses politik.

2. Stereotip dan Persepsi Negatif: Implementasi patriarki juga tercermin dalam stereotip dan persepsi negatif terhadap kemampuan perempuan dalam politik. Perempuan sering dianggap kurang kompeten atau tidak cukup kuat untuk mengemban peran politik yang penting.

Contoh: Ada kasus di mana perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum sering dihadapkan pada kampanye yang berfokus pada penampilan fisik mereka, peran domestik mereka, atau komentar merendahkan yang menganggap bahwa mereka tidak cocok untuk memimpin dalam politik.

3. Ketidakadilan dalam Pengambilan Keputusan: Implementasi patriarki dalam politik juga tercermin dalam ketidakadilan dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi perempuan secara langsung. Kebijakan dan undang-undang sering kali dihasilkan tanpa mempertimbangkan kepentingan dan perspektif perempuan.

Contoh: Dalam beberapa kasus, kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, atau hak-hak perempuan lainnya dapat diambil tanpa melibatkan keterlibatan perempuan secara signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

4. Budaya Dominasi Laki-laki: Implementasi patriarki dalam politik juga terkait dengan budaya dominasi laki-laki yang melekat dalam lingkungan politik. Bahasa dan perilaku yang merendahkan atau memarginalkan

perempuan dapat menciptakan lingkungan yang tidak inklusif dan menekan partisipasi perempuan dalam politik.

Contoh: Adanya perilaku pelecehan, seksisme, atau diskriminasi gender dalam politik dapat membuat perempuan merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk terlibat dalam proses politik atau mengambil peran yang lebih aktif.

Penting untuk mengidentifikasi dan menghadapi implementasi patriarki dalam politik agar perempuan dapat memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan mempengaruhi agenda politik yang relevan bagi mereka.

Representasi perempuan di lembaga legislatif, akan terjadi keseimbangan dalam proses pembentukan -undangan, alokasi anggaran, dan pengawasan. Dalam situasi ini, perhatian dan dukungan yang lebih besar akan diberikan kepada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Artinya, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan politik akan membawa perspektif yang lebih komprehensif dan memprioritaskan isu-isu yang relevan bagi perempuan dan anak-anak.

Milbrath dalam "Sistem Politik Indonesia" mengidentifikasi empat faktor yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik:

1. Faktor perangsang: Seseorang terstimulasi atau tergoda untuk terlibat dalam aktivitas politik karena terpesona oleh peran, kesejahteraan, atau

keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku politik praktis. Rangsangan ini dapat memotivasi mereka untuk mencapai jabatan atau posisi tertentu, baik dalam organisasi politik, birokrasi, eksekutif, legislatif, perusahaan negara, dan sebagainya. Pelaku politik sering menggunakan rangsangan ini untuk mendapatkan dukungan, bahkan dengan cara yang mengabaikan norma atau etika berpolitik, seperti politik uang, pemberian janji-janji, memberikan bantuan dengan tujuan tertentu, dan sejenisnya.

2. Faktor karakteristik pribadi: Individu yang memiliki watak sosial atau kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat cenderung lebih mudah dan mau terlibat dalam aktivitas politik. Mereka memiliki dorongan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Faktor karakter sosial: Faktor ini mencakup status sosial dan ekonomi seseorang yang mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politiknya. Individu dengan status sosial dan ekonomi yang tinggi cenderung terlibat dalam politik untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, penghargaan, dan pengabdian. Sementara itu, individu dengan status sosial dan ekonomi rendah cenderung terlibat dalam politik untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan dan memperoleh pekerjaan yang layak.
4. Faktor situasi dan lingkungan politik: Lingkungan politik yang kondusif mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik dengan senang dan nyaman. Sebaliknya, situasi politik yang kacau atau tidak

kondusif membuat individu ragu untuk terlibat dalam aktivitas politik. Namun, dalam beberapa kasus, seseorang dapat memanfaatkan situasi yang tidak kondusif tersebut untuk mencapai tujuan dan aspirasi tertentu dalam aktivitas politiknya.

Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam menganalisis motivasi dan dorongan individu dalam berpartisipasi dalam politik serta dampaknya terhadap sistem politik dan masyarakat secara keseluruhan.

Partai politik telah mengambil langkah positif dengan memenuhi regulasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan dan calon yang diusung. Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi semakin penting dalam mencapai kesetaraan gender dan menjaga keadilan sosial. Berikut adalah contoh-contoh yang menggambarkan implementasi regulasi kuota 30% dalam keterwakilan perempuan dalam partai politik:

1. Peningkatan Jumlah Perempuan dalam Kepengurusan Partai: Partai politik telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa setidaknya 30% dari kepengurusan partai terdiri dari perempuan. Hal ini mencakup posisi-posisi kunci seperti ketua partai, wakil ketua, dan posisi lainnya dalam struktur kepemimpinan partai.

Partai politik PKB, PDIP dan GOLKAR telah berhasil memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan mereka. Dalam

kepengurusan partai tersebut, terdapat perempuan yang menduduki posisi penting seperti ketua dan wakil ketua partai, serta memegang tanggung jawab strategis dalam pengambilan keputusan.

2. Kandidat Perempuan yang Diusung dalam Pemilihan Umum: Partai politik juga telah memenuhi regulasi kuota 30% dengan mengusung kandidat perempuan dalam pemilihan umum. Ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi calon yang bersaing dalam kontestasi politik dan mencerminkan keberagaman serta inklusivitas dalam perwakilan politik.

Partai politik PKB,PDI dan GOLKAR telah secara aktif mencalonkan perempuan dalam pemilihan umum. Dengan memenuhi regulasi kuota 30%, partai tersebut memberikan platform yang setara bagi perempuan untuk berkompetisi dan mengambil peran yang lebih aktif dalam politik.

3. Pembentukan Program dan Kebijakan yang Mendukung Perempuan: Partai politik juga telah menggunakan regulasi kuota 30% sebagai motivasi untuk mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung perempuan. Ini mencakup isu-isu seperti kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan kebijakan lainnya yang mendorong inklusi dan kesejahteraan perempuan.

Partai politik PKB,PDI-P dan GOLKAR telah mengadopsi kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, termasuk melalui program-program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran gender, dan

langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai bidang kehidupan.

Melalui implementasi regulasi kuota 30% ini, partai politik telah mengambil langkah konkret untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik dalam politik. Hal ini mencerminkan kesadaran dan komitmen partai politik dalam mencapai kesetaraan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

berdasarkan tulisan diatas, indikator terlaksananya pengimplementasian partisipasi politik perempuan dalam tubuh partai dapat ditandai dengan

1. Adanya kader perempuan dalam tubuh partai
2. adanya kegiatan yang mengikut sertakan peran perempuan dalam tubuh partai tersebut
3. keikutsertaan perempuan dalam struktural kepengurusan dalam tubuh partai
4. adanya partisipasi perempuan dalam pemilu
5. adanya upaya untuk mendukung kader perempuan dalam berpolitik, baik secara materil maupun non materil.

Hal ini telah peneliti temukan dalam tubuh setiap partai dibuktikan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang berasal dari partai partai yang peneliti pilih untuk di teliti.